

TAJUK RENCANA

Pesan 'Patmo Pancer'

SENIMAN tari asal Kota Semarang Dr Yoyok Bambang Priyambodo bersama Sanggar Tari Greget Semarang, Selasa (5/9) lalu, menampilkan karyanya berjudul *Patmo Pancer* di Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta. Karya tari (beksan) tersebut dinilai memiliki muatan filosofi dan pesan mengenai karakter kepemimpinan masa depan Indonesia.

Dalam sarasehan sesuai pementasan, Yoyok mengungkapkan bahwa *Patmo Pancer* terdiri dari kata *pat* (papat) atau empat dan *ma* (lima), sedangkan *pancer* berarti menyatunya papat menjadi satu. *Patmo Pancer* merupakan pengejawantahan dari *sedulur papat lima pancer*, yaitu *kakang kawah* (air ketuban), *adhi ari-ari* (plasenta), *pinang getih* (darah), *puser* (pusar). Sedangkan *pancer* adalah diri sendiri.

Yoyok mengatakan karyanya itu tidak sekadar tontonan semata, namun merupakan tuntunan budi pekerti atau *patuladhan* tentang hidup yang bermakna menghidupi, baik lahir maupun batin. *Sedulur papat lima pancer*, bagi seorang pemimpin mampu menyikapi perilaku yang baik, bijaksana, jujur, melindungi dan mengutamakan kebutuhan masyarakat.

Secara kontekstual, *Patmo Pancer* 'mengingatkan' kita kepada para elit politik dan masyarakat, khususnya terkait tahun politik 2024, agar memilih pemimpin masa depan yang memiliki pemahaman papat lima pancer. Memahami *sangkan paraning dumadi*. Pengamat sekaligus koreografer asal Surakarta, Djarot Budi Darsono mengungkapkan bahwa suatu karya seni yang bernilai adiluhung selalu dapat berkembang seiring perkembangan zaman. *Anut jaman kelakone*.

Pesan-pesan dalam *Patmo*

Pancer di TBITS itu juga mengingatkan kita pada tari *Dwimuka* karya Didik Nini Thowok, seni-man tari Yogyakarta. Terlebih dalam kondisi perpolitikan menjelang Pemilu 2024, banyak tokoh dan elit politik bersikap bahkan bertindak dengan 'muka dua'. Tetapi, benarkah menjelang Pemilu 2024, seperti saat ini, banyak tokoh, elit parpol dan petinggi bermuka dua, bertopeng dua, *dwimuka*?

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan bahwa situasi politik Indonesia ke depan seperti berdansa, layaknya manuver yang dilakukan Budiman Sudjatmiko. Berdansa adalah simbol dukungannya sendiri, berdua maupun secara bersama-sama. *Dansa bisa dilakukan dengan berganti-ganti pasangan*.

Pasangannya ganti sana, ganti sini. Pemilu ke depan akan seperti itu. Pemilu ke depan dimaksud mestinya Pemilihan Presiden 2024. Hal itu diungkapkan Megawati dalam Temu Kader di Kantor DPD PDIP DIY, Selasa (22/8) lalu.

Sementara itu Presiden Jokowi pada 29 Agustus lalu mengungkapkan bahwa kondisi politik (saat itu), khususnya terkait bapapres dan bacawapres masih *ngalor ngidul*. Bahkan Senin 4 September 2023, saat menerima audiensi Grace Natalie (Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia), Presiden Jokowi mengatakan masih akan banyak manuver dan banyak drama-drama sinetron.

Kondisi pencapresan seperti saat ini, lebih tepat diingatkan dengan *Patmo Pancer* atau *Dwimuka*? Atau dengan lirik tembang Suket Teki karya Didi Kempol (Alm): *Aku uwis ngerti satenane, kowe selak golek menangmu dhewe. Tak tandur pari jebul thukule malah suket teki*. □-f

'Spirit Haornas' Mengakselerasi Tercapainya DBON

TANGGAL 9 September 1983 merupakan tonggak sejarah bagi dunia olahraga Indonesia. Hari itu mulai dilaksanakan Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) di Stadion Sriwedari Solo oleh Presiden Soeharto. Dua tahun kemudian, terbit Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1985 tentang pencanangan peringatan hari olahraga nasional setiap 9 September. Peringatan Haornas setiap tahun merupakan wujud kepedulian pemerintah akan pentingnya olahraga.

Saat digulirkan pertama kali memakai slogan: 'Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat'. Olahraga milik semua orang tanpa pengecualian. Slogan ini merupakan upaya pemerintah agar olahraga dapat dilakukan seluruh lapisan Masyarakat. Harapannya, jika semua masyarakat berolahraga secara teratur, derajat kesehatannya meningkat. Di sisi lain, olahraga yang terprogram dapat menumbuhkembangkan anak secara maksimal, serta bisa berprestasi di tingkat regional maupun internasional.

Setelah 40 tahun, Kementerian Pemuda dan Olahraga tanggal 9 September 2021 mengeluarkan kebijakan baru, Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). DBON merupakan dokumen rencana induk berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional. Yang dilakukan secara terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga.

Indonesia Bugar

Mewujudkan Indonesia bugar, berkarakter unggul, dan berprestasi dunia menjadi visi DBON. Sedangkan misi di antaranya: (1) mewujudkan masyarakat Indonesia yang berpartisipasi aktif berolahraga dengan tingkat kebugaran jasmani baik. (2) Mewujudkan peserta didik pada satuan pendidikan yang berpartisipasi aktif berolahraga sehingga berkarakter unggul, memiliki kecakapan gerak,

Ngatman Soewito

dan tingkat kebugaran jasmani baik. (3) Mencetak atlet-atlet berprestasi dunia dengan pembinaan atlet jangka panjang yang berbasis Iptek keolahragaan sebagai faktor pendukung utama.

Untuk mewujudkan visi dan misi DBON, pemerintah harus mampu mengeksplorasi semua potensi melalui sistem pembinaan olahraga yang solid di segala lini. Pembinaan harus dilakukan berbasis *sport science* mulai usia di bawah



canaan yang matang. Melalui program DBON inilah pemerintah melakukan pembinaan olahraga secara terencana dan berjenjang.

Kurikulum

Standar kurikulum pembinaan olahraga harus jelas, karena menjadi acuan dalam membina atlet-atlet dari berbagai level. Peningkatan kualitas pelatih melalui pengiriman ke forum-forum ilmiah. Selain itu, pelatih wajib mengikuti program pencangkakan ke negara-negara yang maju olahraganya. Pendekatan berbasis *sport science* dalam membina atlet-atlet mutlak diperlukan agar *data base* atlet-atlet terpancaw.

Kompetisi berjenjang mulai usia dini juga harus diprogramkan. Kompetisi menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi sejauhmana program latihan atlet dapat tercapai. Pengiriman atlet ke luar negeri merupakan faktor yang tidak boleh ditinggalkan. Program *try out* ke luar negeri sebagai ajang untuk mengasah kematangan bertanding atlet dan sebagai acuan merancang strategi pembinaan olahraga agar tidak tertinggal dengan negara lain.

Diperlukan dana yang banyak untuk berkompetisi di luar negeri. Karena itu, diperlukan sponsorship/bapak angkat/masyarakat yang peduli olahraga. Agar Indonesia masuk 10 besar dunia 2045 sebagaimana visi dan misi dari Grand DBON. □-d

*) **Dr Ngatman Soewito**, Korprodi S-2 Penjas FIKK UNY, Alumnus S-3 IOR Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kewenangan Inovatif LO DIY

LEMBAGA Ombudsman DIY (LO DIY) adalah lembaga daerah non struktural yang independen dan memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah dan badan usaha. LO DIY dipandang sebagai sebuah lembaga mitra pengawasan yang diperlukan dalam rangka melakukan *check and balance*. Bisa dikatakan, berperan penting bagi terwujudnya *good and clean governance*.

Peran LO DIY DIY sebagaimana amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman DIY, yaitu selain menerima dan menindaklanjuti aduan, juga memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti persoalan pelayanan publik di DIY meskipun tidak ada warga yang melaporkan. Pada beberapa kasus/isu sensitif, (terkadang) tidak ada masyarakat yang bersedia/berani menjadi pelapor.

Kewenangan Istimewa

Kondisi itulah yang melatarbelakangi adanya kewenangan atas prakarsa sendiri. Kewenangan merupakan kewenangan istimewa dan inovatif untuk menindaklanjuti persoalan penyelenggaraan layanan publik. Kewenangan ini memungkinkan LO DIY untuk mengambil tindak lanjut persoalan publik setelah melalui penilaian dan pertimbangan bahwa persoalan yang muncul tersebut memiliki dampak sistemik.

LO DIY bertindak sebagai *quality control* terhadap produk regulasi maupun standar operasional prosedur dari penyelenggara pelayanan publik. Proses implementasi kewenangan dijalankan atas dasar amanat Pasal 7 huruf c pada Peraturan Gubernur DIY No 72/2022 menggunakan mekanisme investigasi, klarifikasi, koordinasi, mediasi dan FGD.

Implementasi kewenangan ini dipengaruhi dua faktor yaitu konteks dan konten implementasi. Dalam hal konteks implementasi kewenangan dipengaruhi: (1)

Yusticia Eka Noor Ida

Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor. Dalam hal ini aktor dituntut untuk menjabarkan analisa kewenangannya sehingga berpengaruh pada tingkat keberhasilan. Dalam hal konsep kerja sama, para aktor harus memiliki strategi kemitraan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan implementasi. (2) Lingkungan implementasi, yaitu disyaratkan untuk mengakomodir ketugasan anggota LO DIY secara kolektif kolegial dengan budaya kerja konstruktif, struktur kelembagaan yang baik, dan mencakup bidang-bidang yang diperlukan dan mendukung implementasi. Dan (3) kepatuhan/respons pelaksana yang baik dan mendasarkan pada komitmen dan konsensus untuk menjaga komitmen moral.

Konten Implementasi

Pada faktor konten implementasi terdiri dari (1) kepentingan kelompok sasaran. Tindakan korektif LO DIY sudah cukup dipatuhi aparat pemerintah daerah. Sebaliknya dalam bidang swasta masih diperlukan penceraman. Sehingga tidak terjadi pengulangan persoalan yang serupa di masa mendatang. (2) Derajat perubahan dan dampak untuk mengukur tujuan implementasi kewenangan belum terlihat maksimal. Dan (3) dalam hal aktor, secara kuantitas dinilai cukup. Hanya secara kualitas perlu dilakukan *up grading* kompetensi mengingat dinamika persoalan pelayanan publik makin kompleks.

Dukungan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY kepada LO DIY, baik secara regulasi maupun anggaran sudah profesional dan akomodatif untuk keberlangsungan dan keberlanjutannya. Dalam hal faktor budaya dan kearifan lokal masyarakat DIY juga menjadi

faktor pendukung dalam proses implementasi kewenangan. Semua termanifestasi dalam tindak lanjut pelaksanaan kewenangan dengan memperhatikan *paugeran* Jawa namun tetap memperhatikan aturan-aturan formal yang berlaku.

Sebagai dasar keberlanjutan dan kesinambungan kewenangan ini, perlu dilakukan upaya dalam hal peningkatan kapasitas aktor, dukungan penguatan kelembagaan dan keberlanjutan kegiatan monitoring terhadap rekomendasi. Sehingga implementasi kewenangan atas prakarsa sendiri ini akan lebih berguna untuk mewujudkan konsep pemerintahan yang demokratis. Juga mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman, mewujudkan tata pemerintahan. Dan tatanan sosial yang menjamin ke-Bhinneka-Tunggal-Ika-an dalam kerangka NKRI. □-d

*) **Yusticia Eka Noor Ida ST MSc**, Komisioner Lembaga Ombudsman DIY Wakil Ketua Bidang Pengembangan Kelembagaan

Pojok KR

Setelah diperiksa KPK, Muhaimin Iskandar menyatakan siap membantu penuntasan kasus korupsi.

-- Luar biasa!

Tiga jaringan pengedar narkoba di DIY di bongkar, satu di antaranya dari lapas.

-- Kok bisa, ya?

Aparat Sipil Negara harus menjaga marwah bangsa dan negara.

-- Itu wajib.

Berabe

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Beda Zaman Orba dan Reformasi

SEBAGAI seorang lansia yang hidup mengalami zaman Orde Baru dan kemudian Reformasi, saya merasakan banyak sekali perbedaan yang kentara, terutama di kalangan mahasiswa. Paling tidak, jika dulu jelaan Pemilu, KKN mahasiswa malah ditiadakan khawatir akan membuat masalah. Sekarang justru diminta untuk mengedukasi warga agar melek politik. Ini menurut saya sangat menarik.

Permasalahannya, apakah sekarang mahasiswanya antusias mengedukasi politik warga dan bukan kampanye.

Namun sejatinya yang perlu dilihat adalah bagaimana respons warga sendiri, bila ada KKN melakukan edukasi politik. Menarik untuk diteliti. Mengingat partai pun kemudian melakukan sosialisasi dengan 'bungkus edukasi' dan ada fasilitas macam-macam. *) **Yani, Srandakan Bantul**

Yogya dan Kota Lansia

SAYA memang tidak tahu data pasti jumlah lansia di DIY. Tapi Dukpak menyebutkan sekitar 630 ribu pada Desember 2021. Ini tentu jumlah yang tidak sedikit dengan kesejahteraan yang tidak sama dan tentu problema yang tidak sama pula. Namun tampaknya upaya menjaga lansia ini belum segenyar dulu menyosialisasikan pelayanan terpadu (yandu) balita.

sia sudah bergerak di banyak tempat. Namun mungkin juga banyak lansia yang perlu mendapat perhatian dan sapaan, karena seharian ditinggal anak-cucu. Sehingga perlu banyak dipikirkan kehadiran rumah lansia. Bukan rumah jompo dan lansia ditinggal di sana, namun semacam rumah penitipan lansia dari pagi hingga sore. □-d

*) **Fariza, Minomartani Ngaglik Sleman**

Kedaulatan Rakyat
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerbit: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.
Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan: I Hshaq Zubedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Samarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.
Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.
Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil: Asrul Sani.
Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP